



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NOFIA MUTIASARI**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **418738**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 434 m²/153 m² di PEMALANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 147.000.000

1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOBIL, INNOVA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.300.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 69.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 1.054.300.000**III. HUTANG** Rp. 140.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 914.300.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.